

---

**INTEGRASI KONSEP AKUNTANSI BIRU DALAM SISTEM TATA KELOLA  
WISATA BAHARI DI PANTAI LOANG BALOQ**

**Luh Utami<sup>1</sup>, Sutriningsih<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram  
*email: luhutami120185@gamil.com*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji integrasi konsep akuntansi biru dalam sistem tata kelola wisata bahari di Pantai Loang Baloq, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Akuntansi biru merupakan pendekatan pelaporan dan pengelolaan yang memperhitungkan nilai ekonomi, sosial, dan ekologis dari sumber daya kelautan secara holistik. Pendekatan ini penting diterapkan dalam pengelolaan wisata bahari guna mewujudkan keberlanjutan lingkungan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan terdiri dari pengelola wisata masyarakat lokal. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dalam praktik tata kelola dan potensi penerapan akuntansi biru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan wisata di Pantai Loang Baloq masih berfokus pada aspek ekonomi dan pelayanan dasar wisata, tanpa sistem pelaporan terhadap dampak lingkungan dan sosial. Konsep akuntansi biru belum diterapkan secara formal, namun terdapat peluang integrasi melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem pelaporan berbasis lingkungan yang inklusif dan adaptif terhadap kondisi lokal sebagai langkah awal menuju tata kelola wisata bahari yang berkelanjutan.

**Kata Kunci: Akuntansi Biru, Wisata Bahari, Tata Kelola, Lingkungan Pesisir, Pantai Loang Baloq**

**PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumber daya kelautan dan pesisir yang sangat besar, baik dari aspek ekologis maupun ekonomis. Namun, pengelolaan sumber daya tersebut masih menghadapi tantangan serius, seperti eksploitasi berlebihan, perubahan iklim, dan kebijakan yang kurang terkoordinasi. Salah satu pendekatan strategis dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan adalah melalui konsep akuntansi biru (*blue accounting*), yaitu sistem pencatatan dan pelaporan yang mengintegrasikan nilai ekonomi, sosial, dan ekologi dari sumber daya kelautan. Konsep ini mendukung implementasi ekonomi biru yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan kelestarian

ekosistem laut. Menurut penelitian Failler et al., 2023, akuntansi biru merupakan strategi untuk mengukur nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan dari ekosistem laut, yang mendukung praktik bisnis ramah lingkungan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Selain itu, studi oleh Setyawati et al. (2021) menekankan pentingnya kolaborasi multi-pemangku kepentingan dan pengembangan regulasi yang kuat dalam penerapan akuntansi biru di sektor pariwisata bahari Indonesia.

Di negara-negara seperti Filipina dan Seychelles, *blue accounting* telah diadopsi untuk pelaporan berbasis ekosistem dalam sektor kelautan dan perikanan. Perbedaan utama antara akuntansi konvensional dan akuntansi biru terletak pada ruang lingkup pelaporan. Akuntansi konvensional berfokus pada aspek finansial, sementara akuntansi biru meliputi dimensi ekologis dan sosial. Tabel berikut memberikan perbandingan secara umum:

**Tabel 1**  
**Perbandingan Akuntansi Konvensional Dan Akuntansi Biru**

Aspek	Akuntansi Konvensional	Akuntansi Biru
Tujuan	Laba Finansial	Keberlanjutan ekosistem laut
Cakupan	Transaksi Keuangan	Ekonomi, sosial, ekologi
Pelaporan	Laporan Keuangan	Laporan multi-dimensi inklusif
Indikator	Pendapatan, biaya, aset	Kualitas air, keanekaragaman hayati, partisipasi masyarakat

Penelitian oleh Khoiriyah et al. (2024) menunjukkan bahwa akuntansi biru dapat meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan dengan menyediakan informasi yang lebih komprehensif mengenai dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi kelautan. Dengan demikian, integrasi konsep akuntansi biru dalam sistem tata kelola wisata bahari, seperti di Pantai Loang Baloq, menjadi langkah penting untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Seiring dengan meningkatnya popularitas pariwisata bahari di berbagai daerah, kebutuhan akan tata kelola yang berkelanjutan menjadi sangat penting. Pantai Loang Baloq yang terletak di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang memiliki nilai budaya, sosial, dan ekologis yang tinggi. Aktivitas wisata yang terus berkembang di kawasan ini, apabila tidak dikelola dengan prinsip keberlanjutan, berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan dan kerusakan ekosistem pesisir. Selama ini, pengelolaan wisata bahari umumnya masih berfokus pada aspek ekonomi dan belum secara menyeluruh mengintegrasikan nilai-nilai ekologis dalam sistem pelaporannya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dan pengelola wisata dalam menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kurangnya integrasi pendekatan ekologi dalam pengelolaan kawasan pesisir dan wisata bahari dapat menyebabkan degradasi lingkungan laut dan menurunnya daya dukung ekosistem jangka panjang.

Penerapan akuntansi biru (*blue accounting*) menjadi sangat relevan untuk mengukur, mencatat, dan melaporkan kontribusi serta dampak aktivitas wisata terhadap ekosistem pesisir. Integrasi konsep akuntansi biru ke dalam sistem tata kelola wisata bahari tidak hanya memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang holistik, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menjaga keberlanjutan jangka panjang kawasan wisata (Pirman, 2024). Akuntansi biru membantu menyelaraskan tujuan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut melalui penyusunan indikator dan pelaporan yang mencakup aspek ekologis, sosial, dan ekonomi secara simultan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana konsep akuntansi biru telah atau dapat diintegrasikan ke dalam sistem tata kelola wisata bahari di Pantai Loang Baloq. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mendukung pengelolaan wisata pesisir yang lebih berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam proses integrasi konsep akuntansi biru dalam tata kelola wisata bahari, serta menggali pandangan, praktik, dan kebijakan yang berlaku di kawasan Pantai Loang Baloq (Creswell & Poth, 2018). Penelitian ini berupaya menyajikan gambaran kontekstual dan menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti melalui interaksi langsung dengan narasumber dan data lapangan, sebagaimana pentingnya pendekatan kualitatif dalam studi ekologi sosial dan tata kelola sumber daya pesisir (Yulianda et al., 2020). Penelitian dilaksanakan di kawasan Pantai Loang Baloq, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristiknya sebagai salah satu destinasi wisata bahari yang berkembang dan memiliki potensi penerapan prinsip-prinsip akuntansi biru (Fitriani & Santoso, 2023). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik (*thematic analysis*). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Reduksi data: Menyaring informasi yang relevan dari hasil wawancara dan observasi.
2. Penyajian data: Menyusun data dalam bentuk naratif dan tabel/kategori tematik.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: Menafsirkan data untuk menjawab rumusan masalah,

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari sudut pandang ekonomi, Pantai Loang Baloq menunjukkan perkembangan yang signifikan melalui sektor pariwisata bahari. Aktivitas ekonomi yang dominan di kawasan ini meliputi jasa wisata, perdagangan makanan dan minuman, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal yang tumbuh seiring dengan meningkatnya jumlah pengunjung. Pantai ini menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar, baik secara langsung melalui retribusi wisata maupun tidak langsung melalui aktivitas usaha pendukung. Namun, sistem pengelolaan masih didominasi oleh pendekatan konvensional yang fokus pada pemasukan finansial tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh dampak terhadap lingkungan dan sosial. Belum adanya sistem pelaporan berbasis lingkungan atau indikator keberlanjutan menjadikan potensi ekonomi ini belum terkelola secara optimal dan berkelanjutan. Kondisi ini membuka peluang besar bagi integrasi pendekatan akuntansi biru, yakni dengan menggabungkan pencatatan nilai ekonomi, sosial, dan ekologis dalam pengelolaan pantai. Jika diterapkan, pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat daya saing ekonomi kawasan, tetapi juga menjamin keberlanjutan sumber daya pesisir sebagai aset ekonomi jangka panjang.

Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, Pantai Loang Baloq juga menghadapi sejumlah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya sistem pengelolaan lingkungan, yang terlihat dari kurangnya fasilitas pengelolaan sampah, terbatasnya upaya pelestarian ekosistem pesisir, serta rendahnya kesadaran pengunjung terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Selain itu, belum adanya integrasi data dan sistem pelaporan berbasis lingkungan membuat pengambilan kebijakan berbasis bukti menjadi sulit. Ketergantungan terhadap pendapatan jangka pendek dari aktivitas wisata juga membuat pengelola cenderung mengabaikan aspek keberlanjutan. Kurangnya pelatihan bagi masyarakat dan pelaku usaha wisata tentang praktik wisata berkelanjutan turut menjadi kendala dalam mendorong tata kelola

yang ramah lingkungan. Jika tidak segera diatasi, permasalahan ini dapat mengancam kelestarian ekosistem pantai dan menurunkan daya tarik wisata dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif dan strategis yang menggabungkan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis melalui penerapan prinsip akuntansi biru.

Dari sudut pandang akuntansi, peran pemerintah daerah di Pantai Loang Baloq sangat krusial dalam membangun sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup, memiliki tanggung jawab dalam menyusun regulasi yang mewajibkan pelaporan tidak hanya atas aspek keuangan seperti retribusi dan pendapatan UMKM, tetapi juga atas dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas wisata. Dengan menerapkan prinsip akuntansi biru, pemerintah daerah dapat mengintegrasikan data ekonomi, sosial, dan ekologis ke dalam satu sistem pelaporan yang komprehensif, sehingga pengambilan keputusan dapat lebih tepat sasaran dan berorientasi jangka panjang. Selain itu, peran pemerintah juga mencakup fasilitasi pelatihan bagi pelaku wisata dan masyarakat lokal dalam pengumpulan data lingkungan serta pengembangan indikator pelaporan berbasis ekosistem, yang pada akhirnya akan mendukung tata kelola wisata yang berkelanjutan dan inklusif.

Pantai Loang Baloq merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang terletak di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pantai ini memiliki nilai historis, spiritual, dan ekologis yang tinggi. Aktivitas wisata yang ada meliputi wisata pantai, ziarah, kuliner, dan rekreasi keluarga. Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pariwisata bekerja sama dengan kelompok sadar wisata (pokdarwis) dalam pengelolaan kawasan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, tata kelola wisata bahari di Pantai Loang Baloq saat ini masih bersifat konvensional dan belum terstruktur secara optimal. Beberapa temuan utama antara lain:

1. Tidak adanya sistem pelaporan atau pencatatan berbasis lingkungan (misalnya dampak wisata terhadap kualitas air, sampah laut, atau biodiversitas).
2. Fokus utama pengelolaan masih pada aspek pendapatan retribusi, keamanan, dan fasilitas fisik.
3. Partisipasi masyarakat cukup tinggi, namun belum diiringi dengan pelatihan tentang keberlanjutan atau konservasi laut.

Konsep akuntansi biru belum secara eksplisit diterapkan di Pantai Loang Baloq. Namun, terdapat potensi integrasi melalui beberapa aspek berikut:

**Tabel 2**  
**Aspek Potensi Integrasi Akuntansi Biru**

<b>Aspek</b>	<b>Status Saat Ini</b>	<b>Potensi Integrasi Akuntansi Biru</b>
Pelaporan ekonomi wisata	Ada (pendapatan dari retribusi dan UMKM)	Dapat dikembangkan untuk memasukkan nilai ekosistem
Pemantauan lingkungan	Belum ada	Bisa dikembangkan dengan indikator jasa ekosistem (air bersih, keanekaragaman hayati)
Keterlibatan masyarakat	Cukup tinggi	Dapat dilatih sebagai pelaksana pengumpulan data berbasis lingkungan

Kebijakan daerah	Ada regulasi pengelolaan wisata	Perlu dimasukkan prinsip akuntansi lingkungan dan <i>blue economy</i>
------------------	---------------------------------	---

Sumber : Data diolah

Pihak pemangku kepentingan belum menerapkan secara formal konsep akuntansi biru, namun sangat terbuka jika konsep tersebut bisa membantu pengambilan keputusan berbasis data lingkungan dan sosial. Konsep akuntansi biru sejatinya merupakan bentuk pelaporan dan pengukuran yang menggabungkan nilai ekonomi, sosial, dan ekologis dari sumber daya laut dan pesisir. Dalam konteks Pantai Loang Baloq, pendekatan ini belum diterapkan secara sistematis, namun komponen-komponennya mulai tampak seperti pencatatan pendapatan dan partisipasi komunitas.

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi akuntansi biru memerlukan reformasi tata kelola yang meliputi:

1. Peningkatan kapasitas SDM (pengelola dan masyarakat) tentang konsep keberlanjutan dan akuntansi lingkungan.
2. Pengembangan sistem pelaporan berbasis lingkungan, seperti indikator kualitas air, biodiversitas, dan tekanan ekosistem akibat pariwisata.
3. Kolaborasi antarinstansi (dinas pariwisata, dinas lingkungan hidup, Bappeda) untuk mendesain sistem tata kelola berbasis data ekosistem.
4. Pelibatan akademisi dan LSM untuk merancang model akuntansi biru yang sederhana namun efektif digunakan di tingkat lokal.

Hal ini sejalan dengan teori akuntansi lingkungan dan pendekatan ekonomi biru yang menempatkan keberlanjutan sebagai inti dari pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir. Integrasi konsep ini dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya poin 14: Life Below Water.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat di simpulkan bahwa wisata bahari di Pantai Loang Baloq saat ini masih didominasi oleh pendekatan konvensional yang berfokus pada aspek ekonomi dan pelayanan dasar pariwisata. Belum terdapat sistem pelaporan atau evaluasi yang mencakup dampak lingkungan dan sosial secara menyeluruh. Konsep akuntansi biru belum diterapkan secara formal dalam sistem pengelolaan kawasan, baik dalam bentuk kebijakan maupun praktik pencatatan. Meskipun demikian, terdapat elemen-elemen awal seperti pencatatan retribusi wisata, keterlibatan masyarakat, dan regulasi pengelolaan yang bisa menjadi titik masuk untuk pengembangan akuntansi biru di masa depan.

Potensi integrasi akuntansi biru di Pantai Loang Baloq cukup besar, terutama jika pemerintah daerah, pengelola wisata, dan masyarakat lokal mampu berkolaborasi untuk mengembangkan sistem pelaporan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan ekologis. Integrasi ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan dalam pengelolaan wisata bahari. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta dukungan regulasi yang mengakomodasi pelaporan berbasis lingkungan. Selain itu, kolaborasi antara sektor pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil sangat penting untuk mewujudkan sistem tata kelola berbasis akuntansi biru.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, berikut beberapa saran yang dapat disampaikan:

1. Untuk Pemerintah Daerah (Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram) Perlu mulai menyusun kebijakan pengelolaan wisata berbasis lingkungan yang mengadopsi prinsip-prinsip akuntansi biru. Pelatihan bagi pengelola dan pemangku kepentingan wisata mengenai konsep dasar akuntansi biru dan implementasinya dalam pengelolaan kawasan

pesisir. Integrasi lintas sektor (pariwisata, lingkungan, ekonomi) sangat diperlukan dalam menyusun indikator pelaporan dan perencanaan pembangunan kawasan pesisir.

2. Untuk Pengelola Kawasan Wisata dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis):  
Disarankan untuk mulai melakukan pencatatan dan dokumentasi aktivitas wisata secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga dampak sosial dan lingkungan. Mendorong keterlibatan Masyarakat juga diperlukan dalam kegiatan monitoring lingkungan sederhana (misalnya pemantauan sampah, kualitas air, atau vegetasi pesisir).
3. Untuk Akademisi dan Peneliti:  
Diperlukan penelitian lanjutan untuk merumuskan model akuntansi biru yang sederhana dan aplikatif untuk kawasan wisata lokal. Dapat melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam penerapan prinsip ekonomi dan akuntansi biru secara bertahap.
4. Untuk Masyarakat Lokal:  
Meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan ekosistem laut sebagai aset jangka panjang yang mendukung kesejahteraan ekonomi lokal. Berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan pantai dan turut serta dalam program pelestarian yang berbasis komunitas.

## **REFERENSI**

- Azra Fadila Prabowo, A. P. (2020). Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Dalam Pengelolaan obyek wisata Mangrove Pandansari untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Failler, P., Liu, J., Lallemand, P., & March, A. (2023). Blue Accounting Approaches in the Emerging African Blue Economy Context. *Journal of Sustainability Research*, 5(1), 1–25.
- Indonesia, R. (2009). Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Jakarta: Republik Indonesia.
- Khoiriyah, A. Z. (2024). Implementasi Ekonomi Biru Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 1331-1356.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*.
- Moozanah, s. (2024). laba dan keberlanjutan: eksplorasi praktik blue accounting dalam industri perikanan di palabuhan ratu (doctoral dissertation, nusa putra university).
- Pinto, C. A., Silveira, T. M., & Teixeira, S. B. (2020). Beach nourishment practice in mainland Portugal (1950–2017): Overview and retrospective. *Ocean & Coastal Management*, 192, 105211.
- Pirman, n. f. (2024). analisis pemanfaatan mangrove di pesisir kota palopo perspektif blue economy (doctoral dissertation, institut agama islam negeri palopo).

Setyawati, L. R., Tian, H., Cahya, D. D., Novarianti, A. D., & Said, B. D. (2021). Implementasi konsep ekonomi biru dalam pembangunan masyarakat pesisir di kota Sabang. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 178-185.

Umarella, B. (2022). Pengungkapan Blue Accounting Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku. *Akuntansi Dewantara*, 6(3), 102–112